



Katalog BPS : 7203002.72

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2014

<http://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
SULAWESI TENGAH
2014**

<http://sulteng.bps.go.id>



BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH

STATISTIK KEUANGAN DAERAH SULAWESI TENGAH 2014

Katalog : 7203002.72

ISSN : 2354-7456

No. Publikasi : 72000.1407

Ukuran Buku : 21.4 x 27.9 cm

Jumlah Halaman : vi + 44 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Sumber Cover : <http://photo.kontan.co.id/photo/2012/04/09/1652780497p.jpg>

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang disajikan adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pemerintah daerah provinsi maupun keseluruhan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2010–2012.

Berkaitan dengan realisasi pendapatan, beberapa informasi penting yang menjadi fokus isi dalam publikasi ini adalah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan potensi pendapatan lainnya. Sedangkan pada realisasi belanja, dikaitkan dengan besarnya pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung selama periode tahun anggaran. Sumber data berasal dari hasil kompilasi data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta laporan dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih memiliki berbagai kendala. Oleh sebab itu, berbagai kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pengguna data, sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membantu dalam penyediaan data, dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, April 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Johanes De Britto Priyono, M.Sc
NIP. 19590916 1985011 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
II. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data.....	2
1.3 Konsep dan Definisi.....	2
III. RINGKASAN	
2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	6
2.3 Realisasi Pendapatan/Belanja Daerah Kabupaten/Kota	7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, 2010–2012 (%) 8
Tabel 2	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, 2010–2012 (%) 9
Tabel 3	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, 2010–2012 (%)..... 10
Tabel 4	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, 2010–2012 (%) 11
Tabel 5	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, 2010–2012 (%) 12
Tabel 6	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, 2010–2012 (%)..... 13
Tabel 7	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, 2010–2012 (%) 14
Tabel 8	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, 2010–2012 (%) 15
Tabel 9	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, 2010–2012 (%) 16
Tabel 10	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, 2010–2012 (%) 17
Tabel 11	Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu, 2010–2012 (%) 18

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2010–2012 (Milyar)	5
Grafik 2	
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2010–2012 (Milyar)	6
Grafik 3	
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, 2012-2012 (Milyar)	7

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 – 2012	21
Lampiran 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 – 2012	22
Lampiran 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 – 2012	23
Lampiran 4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 – 2012	24
Lampiran 5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2010 – 2012	25
Lampiran 6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2010 – 2012	26
Lampiran 7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2010 – 2012	27
Lampiran 8	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2010 – 2012	28
Lampiran 9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 – 2012	29
Lampiran 10	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2010 – 2012	30
Lampiran 11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2010 – 2012	31
Lampiran 12	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2010 – 2012	32
Lampiran 13	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2010 – 2012	33
Lampiran 14	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2010 – 2012	34

Lampiran 15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 – 2012	35
Lampiran 16	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2010 – 2012.....	36
Lampiran 17	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2010 – 2012	37
Lampiran 18	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2010 – 2012.....	38
Lampiran 19	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2010 – 2012	39
Lampiran 20	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2010 – 2012	40
Lampiran 21	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 – 2012.....	41
Lampiran 22	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2010 – 2012	42
Lampiran 23	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2010 – 2012	43
Lampiran 24	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2010 – 2012	44

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia semakin mempertegas kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai, diharapkan pemerintah daerah lebih dapat leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional guna mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis untuk pengambilan keputusan dan memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara, hasil kompilasi data statistik tentang keuangan daerah sangat bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai bahan penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1. 2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data statistik keuangan pemerintah daerah merupakan hasil kompilasi data sekunder dari laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk pemerintah daerah provinsi, diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PPKAD).

Dalam penyusunannya, rincian pada realisasi pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran, dilakukan dikompilasi berdasarkan Daftar K-1 dan K-2 yang telah disiapkan oleh BPS RI.

1. 3 Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung berasal dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Tak Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan dan terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

RINGKASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengalokasian dana APBD. Sumber dana yang memadai memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah program pembangunan. Pembiayaan pada program unggulan, perluasan jaringan infrastruktur melalui pembelian barang modal, dan penguasaan aset investasi tentu memerlukan dukungan dana APBD. Dengan kebijakan alokasi dana yang kredibel, mampu menciptakan sinergisitas antara efisiensi penggunaan anggaran dan realisasi program pembangunan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Disisi lain, asas transparansi menjadi penting karena terkait penilaian tahunan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

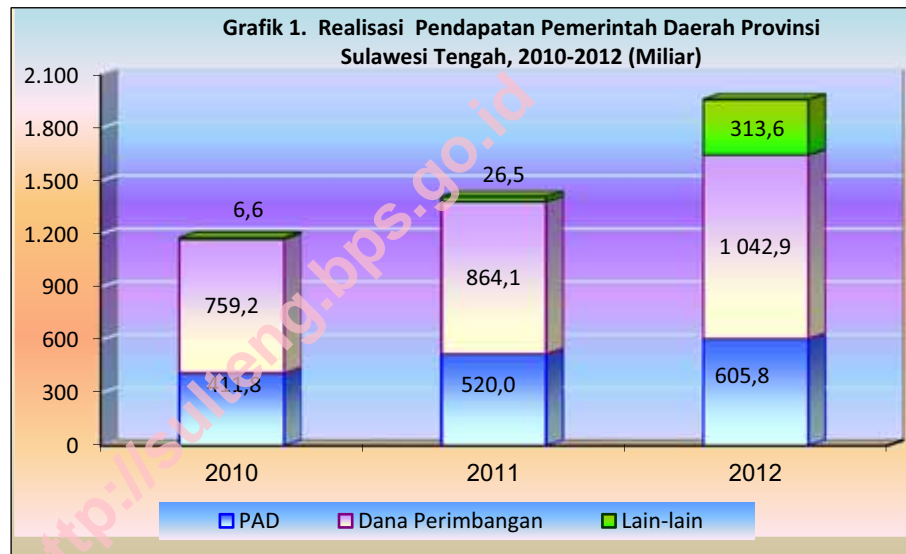
Dilihat dari komposisinya, APBD merefleksikan antara sumber pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja yang bersifat langsung dan tidak langsung. Besarnya PAD dipengaruhi oleh jumlah penerimaan pajak, retribusi daerah, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan potensi pendapatan lainnya. Dana Perimbangan umumnya berasal dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, sumber pendapatan lain dalam struktur APBD merupakan kontribusi dari perolehan dana hibah, pendapatan pajak bagi hasil, dan bantuan lainnya. Sebaliknya, anggaran belanja daerah yang bersifat langsung terutama berupa belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja daerah yang bersifat tidak langsung umumnya dialokasikan pada belanja pegawai, pembayaran bunga dan subsidi, pemberian hibah, bantuan sosial, serta belanja lainnya terkait dengan pembiayaan yang bersifat tidak rutin.

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selama tahun 2012, realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp1.962,9 miliar atau meningkat 39,12 persen dibandingkan tahun 2011. Lonjakan peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 19,78

persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp605,8 miliar, meningkat Rp85,8 miliar atau sebesar 16,51 persen. Sementara itu, dana perimbangan daerah mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan PAD senilai Rp178,8 miliar atau sebesar 20,70 persen. Pada tahun yang sama, pendapatan lain di luar PAD dan dana perimbangan, mengalami lonjakan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Meskipun nilainya masih relatif kecil, persentase peningkatan potensi pendapatan daerah lainnya cukup berperan dalam menambah sumber keuangan APBD. Peningkatan pendapatan PAD yang lebih rendah dibandingkan dana perimbangan mengindikasikan masih tingginya tingkat ketergantungan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap

sumber dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya percepatan dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah sehingga memiliki nilai tambah yang



lebih tinggi. Disisi lain, pengembangan sentra ekonomi yang lebih terintegrasi diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap lonjakan kekuatan ekonomi. Dengan demikian, potensi ekonomi mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam rangka memperkuat sumber keuangan APBD.

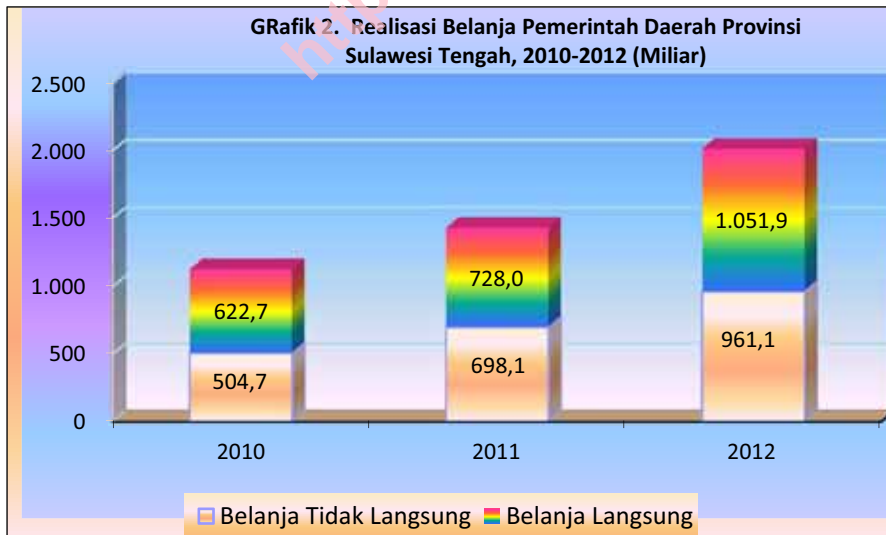
Berdasarkan kontribusinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi Rp605,8 miliar atau sebesar 30,87 persen dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan tercatat Rp1.042,9 miliar atau sebesar 53,15 persen. Relatif masih rendahnya PAD dibandingkan dana perimbangan, memberikan indikasi bahwa potensi daerah belum mampu memberikan nilai tambah guna mendorong pembiayaan program pembangunan. Pendapatan daerah masih mengandalkan dana perimbangan terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selama tiga tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah terlihat fluktuatif yakni sebesar 34,97 persen (2010), sebesar 36,86 persen (2011), dan sebesar 30,87 persen (2012). Sementara itu,

kontribusi dana perimbangan terus mengalami penurunan yakni sebesar 64,47 persen (2010), sebesar 61,26 persen (2011), dan sebesar 53,15 persen (2012). Meskipun perannya masih relatif kecil, pendapatan daerah lainnya di luar PAD dan dana perimbangan, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 0,56 persen (2010), sebesar 1,88 persen (2011), dan sebesar 15,98 persen (2012). Kontribusi terbesar terutama berasal dari perolehan pendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus senilai Rp308,5 miliar.

2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan cukup signifikan pada sisi pengeluaran untuk belanja daerah sebesar 41,16 persen menjadi Rp2.013,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya sebesar 26,51 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja langsung meningkat Rp323,9 miliar atau sebesar 44,49 persen selama tahun 2012. Sementara itu, realisasi belanja tidak langsung juga meningkat Rp263,0 miliar atau sebesar 37,68 persen.

Komposisi realisasi belanja daerah tidak langsung relatif lebih besar dibandingkan realisasi belanja secara langsung. Selama tahun 2012, porsi pengeluaran masing-masing mencapai Rp1.051,9 miliar (52,26 persen) dan Rp961,1 miliar (47,74 persen) dari keseluruhan



realisasi belanja daerah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya yakni belanja tidak langsung mencapai Rp728,0 miliar (51,05 persen) dan Rp698,1 miliar (48,95 persen).

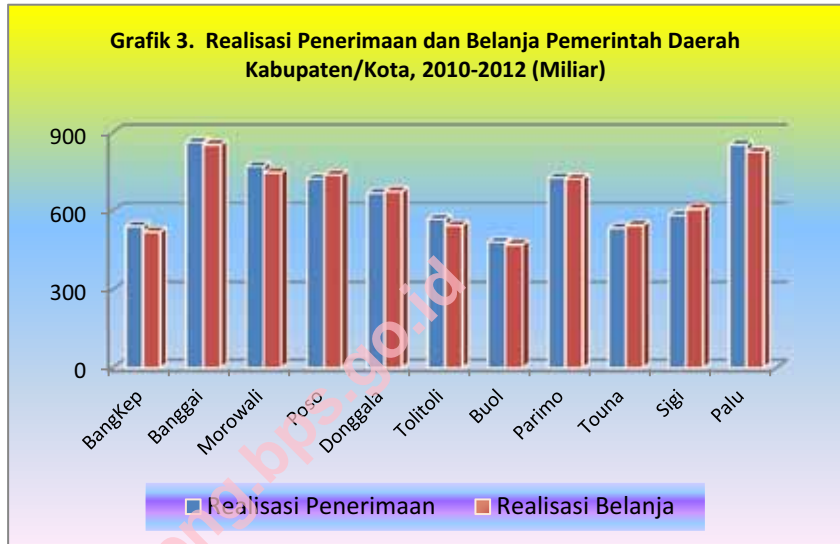
Porsi belanja pegawai secara keseluruhan mencapai Rp454,0 miliar atau sebesar 22,55 persen dari realisasi belanja daerah tahun 2012. Sedangkan alokasi untuk belanja modal hanya mencapai Rp324,9 miliar atau sekitar 16,14 persen, atau lebih kecil dibandingkan porsi belanja barang dan jasa yang mencapai Rp612,6 miliar. Secara keseluruhan, postur

APBD selama tahun 2012 menunjukkan defisit hingga Rp50,6 miliar, lebih besar dibandingkan defisit tahun sebelumnya yakni Rp15,5 miliar.

2.3 Realisasi Pendapatan/Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, realisasi pendapatan daerah seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama

tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali kabupaten Buol. Peningkatan tertinggi dicapai oleh Kota Palu sebesar 18,41 persen, diikuti kabupaten Morowali sebesar 15,96



persen dan Banggai sebesar 10,34 persen. Sedangkan kabupaten Buol mengalami penurunan sebesar 6,81 persen. Dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan tertinggi berasal dari Buol sebesar 89,41 persen, diikuti Morowali sebesar 49,45 persen, Banggai sebesar 45,76 persen, Banggai Kepulauan sebesar 44,04 persen, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 40,53 persen. Sedangkan peningkatan PAD kabupaten lain masing-masing dibawah 40,00 persen. Sementara itu, peningkatan terendah berasal dari Poso sebesar 2,22 persen.

Tingginya tingkat capaian PAD dan besarnya proporsi terhadap keseluruhan pendapatan daerah, memberikan indikasi terhadap tingkat kemandirian wilayah kabupaten/kota sebagai daerah otonomi. Berdasarkan besarnya proporsi PAD, capaian tertinggi berasal dari Kota Palu sebesar 12,73 persen dan diikuti oleh beberapa kabupaten meliputi Banggai sebesar 5,97 persen, Donggala sebesar 5,43 persen, dan Tojo Una-una sebesar 5,02 persen. Meskipun secara umum terdapat peningkatan PAD di seluruh wilayah kabupaten/kota dibandingkan tahun sebelumnya, namun besarnya potensi pendapatan daerah relatif masih bertumpu pada sebagian kecil sentra ekonomi. Bahkan terdapat beberapa kabupaten yang mengalami defisit anggaran karena realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan realisasi perolehan pendapatan. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan dan

belanja daerah dari beberapa kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

2.3.1 Kabupaten Banggai Kepulauan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2012 mencapai Rp539,6 miliar, meningkat 7,48 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp502,0 miliar. Peningkatan anggaran didorong oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,04 persen dari sekitar Rp9,4 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp13,5 miliar tahun 2012. Dana perimbangan juga meningkat sebesar 14,64 persen, lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya sebesar 19,81 persen. Sedangkan realisasi pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 27,06 persen. Perubahan yang terjadi mengakibatkan berubahnya struktur pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni dari 79,66 persen menjadi sekitar 84,96 persen. Sementara itu proporsi pendapat daerah lainnya berubah dari 18,48 persen menjadi 12,54 persen. Pada tahun yang sama, PAD juga mengalami pergeseran dari 1,87 persen menjadi 2,50 persen.

Tabel 1
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan, 2010–2012 (%)

Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	1,59	1,87	2,50
2. Dana Perimbangan	81,49	79,65	84,96
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16,92	18,48	12,54
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	47,36	50,87	49,67
2. Belanja Langsung	52,64	49,13	50,33

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2012 hampir mencapai Rp518 miliar, meningkat 9,62 persen dari tahun sebelumnya. Komposisi belanja daerah terdiri dari 49,67 persen belanja tidak langsung atau senilai Rp257,2 miliar dan 50,33 persen Belanja langsung atau senilai Rp260,7 miliar. Belanja langsung didominasi oleh

belanja modal yang mencapai 64,10 persen, kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 28,87 persen dan 7,03 persen sisanya dipergunakan untuk porsi belanja pegawai.

2.3.2 Kabupaten Banggai

Selama tahun anggaran 2012, Kabupaten Banggai mencatat peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 10,34 persen dari Rp781,6 miliar menjadi 862,4 miliar. Peningkatan tertinggi dipengaruhi oleh PAD dengan pertumbuhan sebesar 45,76 persen, diikuti bagian dana perimbangan sebesar 13,61 persen. Sedangkan pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 12,18 dibandingkan tahun anggaran 2011. Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2012 masih didominasi oleh besarnya dana perimbangan sebesar 79,45 persen, kemudian diikuti oleh bagian pendapatan daerah lainnya sebesar 11,08 persen dan PAD sebesar 5,97 persen.

Tabel 2
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai, 2010–2012 (%)

Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	3,71	4,52	5,96
2. Dana Perimbangan	83,14	77,17	79,45
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13,15	18,31	14,57
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	62,24	65,46	64,36
2. Belanja Langsung	37,76	34,54	35,64

Pada tahun yang sama, realisasi belanja daerah Kabupaten Banggai mencapai Rp853,3 miliar, meningkat 13,72 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebesar 64,36 persen direalisasikan untuk belanja tidak langsung, sedangkan 35,64 persen untuk belanja langsung. Dari senilai Rp304,1 miliar keseluruhan belanja langsung, sebesar 54,03 persen digunakan untuk belanja modal, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masing-masing dialokasikan sebesar 2,03 persen dan 43,94 persen.

2.3.3 Kabupaten Morowali

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan senilai Rp105,9 miliar atau sebesar 15,96 persen dari tahun anggaran 2011. Peningkatan tersebut disebabkan oleh PAD yang mengalami peningkatan sebesar 49,45 persen dan dana perimbangan sebesar 22,69 persen. Sebaliknya pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 33,40 persen menjadi Rp59,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp89,4 miliar. Sumbangan terbesar terhadap keseluruhan pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yang mencapai sebesar 88,30 persen, diikuti pendapatan daerah lainnya dan PAD masing-masing sebesar 7,74 persen dan 3,97 persen.

Tabel 3
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali, 2010–2012 (%)

Uraian	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	2,07	3,08	3,96
2. Dana Perimbangan	82,08	83,45	88,30
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15,85	13,47	7,74
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	47,76	58,67	56,66
2. Belanja Langsung	52,24	41,33	43,34

Sementara itu, realisasi belanja daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi senilai Rp744,6 miliar atau meningkat 25,62 persen. Sebesar 56,67 persen dari keseluruhan belanja daerah berupa belanja tidak langsung sebesar 43,33 persen berupa belanja langsung. Komposisi belanja langsung sebesar Rp322,7 miliar, sebesar 53,84 persen untuk belanja modal, sebesar 37,11 persen untuk belanja barang dan jasa, serta sebesar 9,04 persen untuk belanja pegawai.

2.3.4 Kabupaten Poso

Berdasarkan neraca anggaran tahun 2012, Kabupaten Poso mengalami defisit anggaran senilai Rp14,8 miliar. Hal ini disebabkan jumlah realisasi anggaran pendapatan

tercatat Rp721,9 miliar, namun realisasi belanja mencapai Rp736,7 miliar. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan realisasi sebesar 3,80 persen dari Rp695,4 miliar menjadi Rp721,9 miliar. Pendapatan dana perimbangan, sebagai penyumbang 83,55 persen pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 14,78 persen dari tahun sebelumnya yakni dari Rp525,6 miliar menjadi Rp603,1 miliar. Sementara itu, PAD juga mengalami peningkatan realisasi sebesar 2,22 persen dari Rp25,7 miliar menjadi Rp26,2 miliar. Sebaliknya pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 35,90 persen yakni dari Rp144,3 miliar menjadi Rp92,5 miliar. Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan struktur andil PAD terhadap pendapatan daerah menjadi sebesar 3,63 persen dan bagian pendapatan daerah lainnya sebesar 12,81 persen.

Tabel 4
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Poso, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	3,82	3,69	3,63
2. Dana Perimbangan	83,27	75,56	83,56
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,92	20,75	12,81
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	61,98	59,52	59,58
2. Belanja Langsung	38,02	40,48	40,42

Selama tahun 2012, Kabupaten Poso merealisasikan anggaran Rp736,7 miliar untuk belanja daerah atau mengalami peningkatan sebesar 10,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar 59,58 persen, sedangkan sisanya sebesar 40,42 persen berupa belanja langsung. Belanja yang bersifat langsung umumnya berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah. Alokasi dana senilai Rp297,7 miliar digunakan terutama dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 8,77 persen, belanja barang dan jasa sebesar 42,22 persen, dan belanja modal sebesar 49,01 persen.

2.3.5 Kabupaten Donggala

Pendapatan daerah Kabupaten Donggala mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen dari realisasi senilai Rp664,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp667,2 miliar pada tahun 2012. Peningkatan jumlah anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD sebesar 21,98 persen dan dana perimbangan sebesar 15,76 persen. Adapun peningkatan PAD terutama dipengaruhi meningkatnya perolehan pajak daerah (35,19 persen), retribusi daerah (29,14 persen), dan pendapatan lainnya (15,76 persen). Sedangkan perolehan dari hasil pengolahan kekayaan daerah merosot 70,51 persen. Peningkatan realisasi DAU sebesar 18,55 persen mendorong peningkatan realisasi dana perimbangan sebesar 15,76 persen, sedangkan pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 54,40 persen. Peningkatan realisasi PAD dan dana perimbangan mempengaruhi oleh besarnya kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerah masing-masing sebesar 5,43 persen dan 84,49 persen. Di sisi lain, terjadi penurunan pendapatan daerah lainnya sebesar 10,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	4,25	4,47	5,43
2. Dana Perimbangan	79,52	73,32	84,49
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16,23	22,21	10,08
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	57,43	50,09	53,66
2. Belanja Langsung	42,57	49,91	46,34

Realisasi belanja daerah senilai Rp673,0 miliar tahun 2012, mengakibatkan defisit anggaran senilai Rp6,1 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, keseluruhan realisasi belanja daerah meningkat 27,39 persen. Pada tahun 2012 proporsi besarnya belanja daerah sebesar 53,66 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung, sedangkan sebesar 46,34 persen untuk belanja langsung. Total anggaran belanja langsung tercatat Rp312,1 miliar,

dialokasikan 9,90 persen untuk belanja pegawai sebesar 41,33 persen untuk belanja barang dan jasa serta sebesar 48,77 persen belanja modal.

2.3.6 Kabupaten Tolitoli

Keseluruhan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2012 di Kabupaten Tolitoli meningkat 6,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp535,0 miliar. Berdasarkan neraca realisasi anggaran pendapatan, terjadi defisit mencapai Rp106,0 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pendapatan senilai Rp567,4 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang mencapai Rp673,4 miliar. Disisi pendapatan, terjadi peningkatan PAD sebesar 15,98 persen dan dana perimbangan sebesar 18,32 persen. Sedangkan pendapatan daerah lainnya menurun 49,36 persen. Kontribusi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2012 berasal dari dana perimbangan sebesar 87,99 persen, diikuti oleh bagian pendapatan daerah lainnya sebesar 8,60 persen dan PAD sebesar 3,40 persen.

Tabel 6
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tolitoli, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	3,05	3,11	3,40
2. Dana Perimbangan	88,70	78,87	88,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,25	18,01	8,60
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	65,18	56,22	53,66
2. Belanja Langsung	34,82	43,78	46,34

Dibandingkan tahun sebelumnya, keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tolitoli mengalami peningkatan sebesar 27,59 persen menjadi Rp673,4 miliar. Dari sejumlah alokasi belanja tersebut, digunakan untuk belanja langsung sebesar 46,34 persen dan 53,66 persen digunakan untuk belanja tidak langsung. Sebesar 48,77 persen dari total Rp312,1 miliar belanja langsung direalisasikan untuk belanja modal, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang masing-masing sebesar 9,90 persen dan 41,32 persen.

2.3.7 Kabupaten Buol

Pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2012 secara keseluruhan mencapai Rp478,7 miliar, menurun 6,81 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp513,7 miliar. Penurunan disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 53,10 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 11,05 persen, dan pendapatan lainnya sebesar 64,32 persen. Namun demikian, PAD dan dana perimbangan secara umum meningkat masing-masing 89,41 persen dan 6,14 persen. Dilihat dari strukturnya, porsi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan sebesar 88,79 persen, sedangkan PAD dan pendapatan daerah lainnya masing-masing hanya berperan sebesar 3,42 persen dan 7,80 persen. Dibandingkan keseluruhan kabupaten lainnya, pendapatan daerah Kabupaten Buol merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan pada tahun 2012.

Tabel 7
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Buol, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	2,98	1,68	3,42
2. Dana Perimbangan	84,20	77,96	88,79
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,82	20,36	7,79
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	51,20	47,43	56,77
2. Belanja Langsung	48,80	52,57	43,23

Sebagaimana halnya pada pendapatan daerah, Kabupaten Buol tercatat merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang realisasi belanja daerahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Buol mencapai Rp519,2 miliar pada tahun 2012, menurun 9,62 persen menjadi Rp469,2 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya belanja langsung sebesar 25,68 persen. Realisasi belanja daerah secara keseluruhan dialokasikan untuk belanja langsung sebesar 43,23 persen dan belanja tidak langsung sebesar 56,77. Dari sebesar Rp202,8 miliar total belanja langsung digunakan sebagai belanja modal senilai Rp96,1

miliar (47,40 persen), sedangkan belanja barang jasa senilai Rp64,0 miliar (31,54 persen), dan belanja pegawai senilai Rp42,7 miliar (21,06 persen).

2.3.8 Kabupaten Parigi Moutong

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2012 mencatat realisasi pendapatan senilai Rp726,1 miliar atau meningkat 7,96persen dibandingkan tahun 2011 yang hanya tercatat senilai Rp672,6 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya perolehan PAD yang meningkat 40,53 persen, diikuti dana perimbangan sebesar 13,35 persen. Sedangkan pendapatan daerah lainnya menurun 26,76 persen. Struktur pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dengan andil sebesar 85,50 persen, diikuti PAD dan pendapatan daerah lainnya masing-masing sebesar 3,98 persen dan 10,52 persen.

Tabel 3
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	2,40	3,06	3,98
2. Dana Perimbangan	82,85	81,43	85,50
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14,75	15,51	10,52
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	54,66	57,65	55,09
2. Belanja Langsung	45,34	42,35	44,91

Selama tahun 2012, Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan belanja daerah senilai Rp721,7 miliar, meningkat 19,17 persen dari tahun 2011 senilai Rp605,6 miliar. Belanja tidak langsung terealisasi senilai Rp397,6 miliar rupiah atau sebesar 55,09 persen, sedangkan belanja langsung senilai Rp324,1 miliar atau sebesar 44,91 persen. Alokasi belanja langsung senilai Rp324,1 miliar digunakan untuk belanja pegawai (11,33 persen), belanja barang dan Jasa (39,59 persen), dan belanja modal (49,08 persen).

2.3.9 Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2012 memperoleh pendapatan daerah senilai Rp533,3 miliar, meningkat 9,15 persen dibandingkan tahun 2011. Peningkatan realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh meningkatnya realisasi PAD sebesar 16,13 persen dan dana perimbangan sebesar 15,50 persen. Sedangkan pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 28,16 persen. Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat didominasi dana perimbangan yakni sebesar 85,36 persen, sedangkan PAD dan pendapatan daerah lainnya masing-masing hanya sebesar 5,02 persen dan 9,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Tojo Una-una masih sangat tergantung bantuan pemerintah pusat.

Tabel 9
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	4,81	4,72	5,02
2. Dana Perimbangan	83,25	80,66	85,36
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,94	14,62	9,62
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	43,65	44,78	45,06
2. Belanja Langsung	56,35	55,22	54,94

Realisasi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2012 mencapai Rp543,0 miliar, meningkat 17,65 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp461,6 miliar rupiah. Belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2011 sebesar 18,39 persen dan belanja langsung sebesar 17,04 persen. Sebesar 54,94 persen dari keseluruhan belanja daerah atau senilai Rp298,4 miliar, realisasi belanja langsung dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 5,15 persen, belanja barang dan jasa sebesar 16,73 persen, dan belanja modal sebesar 33,06 persen. Selama tahun 2012, Kabupaten Tojo Una-Una mengalami defisit senilai Rp9,7 miliar, dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp543,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan yang hanya senilai Rp533,3 miliar.

2.3.10 Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi pada tahun anggaran 2012 merealisasikan pendapatan daerah senilai Rp581,3 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,51 persen dari realisasi tahun sebelumnya seiring dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah sebagai sebuah daerah yang mandiri. Peningkatan realisasi terjadi di seluruh komponen pendapatan daerah meliputi PAD sebesar 12,89 persen dan dana perimbangan sebesar 11,92 persen, sedangkan pendapatan daerah lainnya menurun 48,78 persen. Dilihat dari struktur pembentuknya, dana perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 88,41 persen, diikuti oleh pendapatan daerah lainnya sebesar 9,59 persen dan PAD sebesar 1,99 persen. Sebagaimana halnya pada beberapa kabupaten lain, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sigi yang relatif lebih kecil dibandingkan realisasi belanja selama 2012 menyebabkan terjadinya defisit anggaran senilai Rp24,6 miliar.

Tabel 10
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sigi, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	2,12	1,77	1,99
2. Dana Perimbangan	80,07	79,40	88,41
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17,81	18,83	9,59
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	55,62	51,59	51,86
2. Belanja Langsung	44,38	48,41	48,14

Selama tahun 2012, Kabupaten Sigi merealisasikan anggaran belanja daerah senilai Rp605,9 miliar, meningkat 11,06 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dilihat dari proporsi belanja daerah, belanja tidak langsung tercatat Rp314,2 miliar (51,86 persen) dan belanja langsung sejumlah Rp291,7 miliar (48,14 persen). Realisasi belanja langsung dialokasikan untuk belanja pegawai (11,35 persen), belanja barang dan jasa (44,84 persen), serta belanja modal (43,82 persen).

2.3.11 Kota Palu

Keseluruhan pendapatan daerah Kota Palu tahun anggaran 2012 mencapai Rp851,8 miliar atau mengalami peningkatan 18,41 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp719,4 miliar. Seluruh komponen pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan masing-masing PAD sebesar 38,36 persen, dana perimbangan sebesar 19,15 persen, dan pendapatan daerah lainnya sebesar 5,53 persen. PAD Kota Palu sebagai tolok ukur kinerja daerah, dengan andil sebesar 12,73 persen terhadap total pendapatan daerah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Palu memiliki kontribusi PAD terbesar dibandingkan keseluruhan wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, pendapatan daerah masih ditopang tingginya dana perimbangan sebesar 68,72 persen, terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 60,20 persen.

Tabel 11
Persentase Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kota Palu, 2010–2012 (%)

Jenis Pendapatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	8,99	10,89	12,73
2. Dana Perimbangan	68,97	68,29	68,72
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22,04	20,82	18,55
Belanja Pemerintah Daerah			
1. Belanja Tidak Langsung	64,35	62,03	63,16
2. Belanja Langsung	35,65	37,97	36,84

Kota Palu pada tahun 2012 merealisasikan belanja daerah sejumlah Rp825,5 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan 18,61 persen dari tahun 2011 yang hanya sebesar Rp696,0 miliar. Peningkatan realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan belanja tidak langsung sebesar 20,76 persen dan belanja langsung sebesar 15,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi belanja langsung tahun 2012 mencapai Rp304,1 miliar atau 36,84 persen dari total belanja daerah, sedangkan 63,16 persen sisanya direalisasikan untuk belanja tidak langsung. Belanja barang dan jasa mendapat porsi terbesar dari belanja langsung mencapai Rp122,5 miliar atau 14,84 persen. Sementara itu

belanja pegawai dan belanja modal masing-masing terealisasi sebesar Rp59,8 miliar (7,25 persen) dan Rp121,8 miliar (14,75 persen).

<http://sulteng.bps.go.id>

Lampiran

<http://sultengbps.go.id>

Lampiran 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1 177 609 898	1 410 593 609	1 962 393 167
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	176 688 420	205 216 673	147 788 886
1. Pendapatan Asli Daerah	411 797 140	519 974 416	605 821 437
1.1. Pajak Daerah	344 354 727	421 221 594	494 753 016
1.2. Retribusi Daerah	29 650 214	14 058 850	3 123 783
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11 384 015	17 796 093	5 474 894
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26 408 183	66 897 879	102 469 745
2. Dana Perimbangan	759 172 266	864 098 666	1 042 926 565
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	71 244 195	82 757 807	97 601 766
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	659 331 271	743 161 759	902 087 729
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	28 596 800	38 179 100	43 237 070
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6 640 493	26 520 527	313 645 164
3.1. Pendapatan Hibah	2 089 380	3 589 590	5 140 471
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	4 551 113	11 280 937	308 504 693
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6. Pendapatan Lainnya	-	11 650 000	-

Lampiran 2
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	1 127 256 721	1 426 082 334	2 013 021 740
1. Belanja Tidak Langsung	504 698 487	698 081 241	961 116 052
1.1. Belanja Pegawai	291 205 303	329 217 099	339 580 347
1.2. Belanja Bunga	-	-	169 233
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	58 608 736	112 792 357	350 879 809
1.5. Belanja Bantuan Sosial	13 923 701	13 158 771	6 705 100
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	93 456 634	179 200 037	221 449 610
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	47 504 113	66 280 191	41 098 927
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	2 474 577	1 233 026
2. Belanja Langsung	622 558 234	728 001 093	1 051 905 688
2.1. Belanja Pegawai	59 207 689	75 293 666	114 424 679
2.2. Belanja Barang dan Jasa	359 558 245	444 210 633	612 618 688
2.3. Belanja Modal	203 792 301	208 496 794	324 862 320

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

Lampiran 3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	409 615 412	502 054 720	539 609 080
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30 077 945	31 626 697	51 419
1. Pendapatan Asli Daerah	6 505 839	9 372 321	13 499 831
1.1. Pajak Daerah	2 128 115	4 261 449	3 985 503
1.2. Retribusi Daerah	884 481	1 856 436	3 957 275
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	224 207	344 616	107 118
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3 269 036	2 909 820	5 449 935
2. Dana Perimbangan	333 786 689	399 916 296	458 445 639
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	27 053 066	27 992 316	28 632 302
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	273 612 923	323 380 879	371 918 157
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	33 120 700	48 543 100	57 895 180
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69 322 884	92 765 900	67 663 610
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	5 501 012	7 248 105	12 855 699
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	60 221 959	82 917 882	53 735 706
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 599 913	2 599 913	1 072 206
3.6. Pendapatan Lainnya	-	31 626 697	-

Lampiran 4
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	433 098 056	472 518 292	517 958 250
1. Belanja Tidak Langsung	205 113 607	240 352 921	257 244 738
1.1. Belanja Pegawai	181 936 110	208 190 194	237 894 294
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	4 526 888	13 734 562	3 933 308
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 135 000	3 415 000	1 000 010
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	14 515 609	15 013 164	13 521 191
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-	895 936
2. Belanja Langsung	227 984 449	232 165 370	260 713 512
2.1. Belanja Pegawai	12 544 167	13 161 696	18 330 961
2.2. Belanja Barang dan Jasa	49 120 377	64 655 437	75 272 879
2.3. Belanja Modal	166 319 904	154 348 237	167 109 672

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 5
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	675 358 217	781 606 353	862 445 269
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47 726 705	85 923 239	-
1. Pendapatan Asli Daerah	25 045 048	35 337 773	51 508 053
1.1. Pajak Daerah	6 383 971	12 858 651	15 601 547
1.2. Retribusi Daerah	12 227 869	16 428 085	27 595 172
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 092 442	1 664 665	552 553
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5 340 764	4 386 372	7 758 781
2. Dana Perimbangan	561 520 982	603 142 422	685 239 108
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	38 541 999	34 843 945	43 483 569
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	474 875 783	504 060 276	580 225 459
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	48 103 200	64 238 200	61 530 080
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	88 792 188	143 126 159	125 698 108
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	14 896 241	23 741 089	26 938 219
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	71 401 959	116 391 081	95 546 431
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 493 988	2 993 989	3 213 458
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	862 445 269
			-

Lampiran 6
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	667 762 033	750 357 356	853 335 880
1. Belanja Tidak Langsung	415 617 001	491 201 970	549 225 573
1.1. Belanja Pegawai	391 762 350	441 776 931	504 988 347
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	694 090	564 000	-
1.4. Belanja Hibah	11 444 982	19 144 324	8 761 547
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 769 555	5 682 440	3 457 800
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6 935 637	11 286 699	13 497 810
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	-	12 551 076	16 091 635
1.8. Belanja Tidak Terduga	10 387	196 500	2 428 434
2. Belanja Langsung	252 145 032	259 155 386	304 110 307
2.1. Belanja Pegawai	5 216 114	6 255 843	6 171 233
2.2. Belanja Barang dan Jasa	89 211 514	130 002 474	133 617 808
2.3. Belanja Modal	157 717 404	122 897 069	164 321 266

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 7
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	590 295 575	663 787 533	769 737 506
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10 436 601	-	-
1. Pendapatan Asli Daerah	12 193 839	20 427 012	30 528 399
1.1. Pajak Daerah	1 664 101	3 077 846	5 019 173
1.2. Retribusi Daerah	6 932 001	11 266 076	20 624 630
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	1 847 792	497 693
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3 597 787	4 235 299	4 386 903
2. Dana Perimbangan	484 546 259	553 944 668	679 658 898
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	49 827 269	69 731 918	76 051 953
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	393 928 690	435 729 051	548 247 835
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	40 790 300	48 483 700	-
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	93 555 426	89 415 852	59 550 209
3.1. Pendapatan Hibah	59 710 959	16 939 792	-
3.2. Dana Darurat	867 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 605 287	14 768 163	17 592 976
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	17 603 612	54 854 165	39 698 517
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 603 732	2 853 732	2 258 717
3.6. Pendapatan Lainnya	5 164 836	-	-

Lampiran 8
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun
Anggaran 2011 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	598 506 393	592 724 337	744 587 716
1. Belanja Tidak Langsung	285 830 302	347 752 391	421 851 459
1.1. Belanja Pegawai	247 473 314	301 415 316	337 919 167
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	12 180 000	10 955 696	50 931 324
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8 076 085	9 893 077	6 343 050
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	16 360 000	24 480 530	25 443 327
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 740 903	1 007 773	1 214 591
2. Belanja Langsung	312 676 091	244 971 946	322 736 257
2.1. Belanja Pegawai	20 964 714	22 016 343	29 189 632
2.2. Belanja Barang dan Jasa	112 033 308	98 934 124	119 783 362
2.3. Belanja Modal	179 678 069	124 021 479	173 763 263

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 9
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	554 979 291	695 429 034	721 861 613
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48 101 427	37 678 141	-
1. Pendapatan Asli Daerah	21 179 872	25 654 921	26 224 302
1.1. Pajak Daerah	4 031 995	5 035 084	5 548 695
1.2. Retribusi Daerah	9 098 042	13 673 257	13 665 264
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 251 353	1 900 713	612 501
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6 798 480	5 045 866	6 397 842
2. Dana Perimbangan	462 116 890	525 463 131	603 141 171
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	34 660 353	34 142 751	34 658 712
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	387 195 137	433 883 180	509 604 879
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	40 261 400	57 437 200	58 877 580
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71 682 528	144 310 981	92 496 140
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	9 530 614	15 334 908	16 492 223
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	58 567 652	126 976 073	73 455 481
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 584 261	2 000 000	2 548 436
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 10
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	590 022 316	669 530 141	736 679 387
1. Belanja Tidak Langsung	365 699 027	398 500 643	438 932 836
1.1. Belanja Pegawai	317 186 780	358 973 861	401 670 203
1.2. Belanja Bunga	82 193	94 202	30 408
1.3. Belanja Subsidi	1 975 000	6 370 000	5 649 000
1.4. Belanja Hibah	23 843 400	10 861 786	7 383 052
1.5. Belanja Bantuan Sosial	6 914 434	6 397 997	5 485 030
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	977 166	977 166	977 166
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	13 292 564	13 973 563	16 829 989
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 427 488	852 068	907 988
2. Belanja Langsung	224 323 289	271 029 498	297 746 550
2.1. Belanja Pegawai	22 402 115	24 622 701	26 103 260
2.2. Belanja Barang dan Jasa	100 947 648	110 156 642	125 723 068
2.3. Belanja Modal	100 973 525	136 250 155	145 920 222

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 11
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	549 069 265	664 225 188	667 247 744
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37 703 196	59 826 838	52 287 956
1. Pendapatan Asli Daerah	23 311 791	29 678 660	36 201 061
1.1. Pajak Daerah	14 123 731	15 693 082	21 215 867
1.2. Retribusi Daerah	2 847 079	5 193 874	6 707 311
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 547 343	2 312 253	681 918
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 793 638	6 479 451	7 595 965
2. Dana Perimbangan	436 622 447	487 025 377	563 774 961
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	32 771 327	29 589 675	29 742 501
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	351 934 720	392 154 602	464 885 380
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 916 400	65 281 100	69 147 080
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	89 135 477	147 521 151	67 271 722
3.1. Pendapatan Hibah	-	2 000 000	123 571
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 125 404	22 271 419	15 567 209
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	72 075 261	119 384 849	48 558 453
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 934 813	3 864 883	3 022 489
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 12
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	528 326 147	673 019 680	673 367 279
1. Belanja Tidak Langsung	303 444 112	337 125 931	361 316 685
1.1. Belanja Pegawai	263 704 221	293 530 460	325 755 898
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	19 696 075	24 948 713	7 706 900
1.5. Belanja Bantuan Sosial	2 514 440	3 852 350	11 980 649
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 084 720	1 475 442	1 408 129
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	14 688 314	12 318 966	12 248 333
1.8. Belanja Tidak Terduga	756 342	1 000 000	2 216 776
2. Belanja Langsung	224 882 036	335 893 749	312 050 594
2.1. Belanja Pegawai	17 989 854	29 623 785	30 884 432
2.2. Belanja Barang dan Jasa	85 134 218	134 567 427	128 985 195
2.3. Belanja Modal	121 757 964	171 702 537	152 180 967

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 13
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	430 013 283	534 975 629	567 355 291
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11 823 910	25 226 347	-
1. Pendapatan Asli Daerah	13 131 984	16 655 710	19 316 550
1.1. Pajak Daerah	2 575 311	3 210 996	3 527 271
1.2. Retribusi Daerah	7 634 369	7 593 548	9 270 399
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 073 439	1 526 964	510 349
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1 848 864	4 324 202	6 008 531
2. Dana Perimbangan	381 413 653	421 950 704	499 241 802
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	22 833 895	22 713 527	23 742 504
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	319 134 358	351 739 677	436 210 238
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	39 445 400	47 497 500	39 289 060
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35 467 644	96 369 213	48 796 939
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	8 847 578	13 904 255	14 028 944
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	18 928 577	80 464 958	31 748 453
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	7 691 489	2 000 000	3 019 542
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 14
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	388 033 918	527 764 251	542 153 175
1. Belanja Tidak Langsung	252 915 039	296 719 701	322 824 051
1.1. Belanja Pegawai	211 240 945	262 530 501	288 669 611
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	4 734 378	7 080 000
1.4. Belanja Hibah	17 714 170	3 196 701	5 057 535
1.5. Belanja Bantuan Sosial	3 276 876	4 458 175	4 838 700
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	397 641	83 578	99 142
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	16 128 572	21 649 768	13 835 021
1.8. Belanja Tidak Terduga	4 156 835	66 600	3 244 042
2. Belanja Langsung	135 118 879	231 044 550	219 329 125
2.1. Belanja Pegawai	15 708 005	18 489 392	18 621 763
2.2. Belanja Barang dan Jasa	62 683 317	93 660 491	100 537 893
2.3. Belanja Modal	56 727 557	118 894 667	100 169 468

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 15
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	426 500 811	513 684 326	478 711 332
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13 534 656	2 747 698	7 893 557
1. Pendapatan Asli Daerah	12 725 886	8 633 017	16 351 801
1.1. Pajak Daerah	2 022 081	2 194 248	3 041 025
1.2. Retribusi Daerah	1 890 844	1 453 793	8 245 644
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2 396 359	3 197 111	1 499 579
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6 416 602	1 787 866	3 565 553
2. Dana Perimbangan	359 103 081	400 461 434	425 041 197
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	24 685 904	26 014 616	24 619 992
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	299 404 077	328 940 318	359 941 565
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	35 013 100	45 506 500	40 479 640
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	54 671 844	104 589 875	37 318 334
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 343 393	11 009 830	12 969 649
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	40 307 959	89 868 826	23 060 581
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	8 020 492	2 529 215	1 288 104
3.6. Pendapatan Lainnya	-	1 182 004	-

Lampiran 16
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	392 946 927	519 189 006	469 231 973
1. Belanja Tidak Langsung	201 177 609	246 249 534	266 395 260
1.1. Belanja Pegawai	176 303 573	216 487 672	234 363 637
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	2 600 000	2 500 000	-
1.4. Belanja Hibah	10 771 550	19 700 887	26 039 224
1.5. Belanja Bantuan Sosial	573 700	500 000	-
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	260 429	457 515	457 030
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	6 535 000	5 000 000	4 056 080
1.8. Belanja Tidak Terduga	4 133 358	1 603 460	1 479 289
2. Belanja Langsung	191 769 318	272 939 472	202 836 713
2.1. Belanja Pegawai	24 813 183	30 197 013	42 716 569
2.2. Belanja Barang dan Jasa	59 826 832	84 344 300	63 970 383
2.3. Belanja Modal	107 129 303	158 398 159	96 149 761

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 17
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	551 661 598	672 566 548	726 110 078
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	14 309 157	68 597 053	19 996 353
1. Pendapatan Asli Daerah	13 224 691	20 578 988	28 919 161
1.1. Pajak Daerah	2 963 407	3 671 050	4 663 569
1.2. Retribusi Daerah	4 229 936	8 472 696	16 844 592
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 811 463	166 984	813 236
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 219 885	6 765 259	6 597 764
2. Dana Perimbangan	457 075 285	547 685 241	620 802 707
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	29 164 698	2 857 235	32 697 026
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	384 004 987	447 590 706	520 677 901
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	43 905 600	70 237 300	67 427 780
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81 361 623	104 292 319	76 388 209
3.1. Pendapatan Hibah	1 533 068	422 341	1 102 851
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	13 295 830	20 860 324	25 188 576
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	61 899 275	79 736 205	47 716 339
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 633 449	3 273 449	2 380 443
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 18
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	540 208 141	605 599 847	721 719 268
1. Belanja Tidak Langsung	295 277 239	349 115 670	397 610 369
1.1. Belanja Pegawai	255 878 983	30 730 294	355 678 385
1.2. Belanja Bunga	3 690 389	6 119 117	2 619 718
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	10 420 849	350 000	7 269 980
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 169 400	4 650 300	5 291 950
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	834 949	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	19 103 000	200 000	24 839 252
1.8. Belanja Tidak Terduga	179 670	826 695	1 911 084
2. Belanja Langsung	244 930 902	256 484 177	324 108 899
2.1. Belanja Pegawai	24 459 944	26 603 284	36 718 875
2.2. Belanja Barang dan Jasa	96 004 834	126 083 186	128 323 935
2.3. Belanja Modal	124 466 124	103 797 707	159 066 089

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 19
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	415 285 138	488 629 280	533 336 733
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35 732 834	48 326 997	9 730 448
1. Pendapatan Asli Daerah	19 995 802	23 047 285	26 765 744
1.1. Pajak Daerah	1 494 304	3 203 297	5 422 927
1.2. Retribusi Daerah	6 076 083	13 107 236	12 884 333
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1 118 685	1 576 469	487 312
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11 306 728	5 160 283	7 971 172
2. Dana Perimbangan	345 708 680	394 136 670	455 245 988
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	29 412 896	28 798 726	29 746 377
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	273 095 484	310 268 045	373 700 451
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	43 200 300	55 069 900	51 799 160
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49 580 655	71 445 324	51 325 001
3.1. Pendapatan Hibah	33 773 271	-	136 748
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 088 905	11 053 375	15 764 245
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	6 274 250	54 447 721	23 663 517
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 444 228	5 944 228	11 760 490
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 20
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	420 693 262	461 582 759	543 031 393
1. Belanja Tidak Langsung	183 634 312	206 677 471	244 679 158
1.1. Belanja Pegawai	156 036 308	183 777 995	209 951 737
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	15 066 120	14 692 444	11 528 728
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 712 673	2 684 914	1 118 318
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	499 500	495 450	470 784
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	7 463 111	4 653 364	14 163 574
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 856 600	373 303	7 446 017
2. Belanja Langsung	237 058 949	254 905 288	298 352 235
2.1. Belanja Pegawai	23 576 923	27 647 824	27 954 562
2.2. Belanja Barang dan Jasa	95 837 984	97 298 711	90 876 843
2.3. Belanja Modal	117 644 042	129 958 753	179 520 830

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 21
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	473 730 530	578 298 752	581 268 776
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15 300 212	58 293 195	-
1. Pendapatan Asli Daerah	10 024 946	10 259 653	11 582 483
1.1. Pajak Daerah	1 451 660	2 154 060	3 032 605
1.2. Retribusi Daerah	1 674 220	3 426 320	4 450 005
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6 899 065	4 676 273	4 099 873
2. Dana Perimbangan	379 319 088	459 170 408	513 922 083
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	19 759 832	21 815 574	19 803 567
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	329 604 056	383 436 034	442 899 906
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	29 955 200	53 918 800	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84 386 497	108 868 691	55 764 210
3.1. Pendapatan Hibah	72 899 151	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 550 902	5 264 588	8 972 934
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	87 027 659	41 169 086
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	9 936 444	16 576 444	5 622 190
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-

Lampiran 22
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	463 420 373	545 523 810	605 865 823
1. Belanja Tidak Langsung	257 757 319	281 461 841	314 207 459
1.1. Belanja Pegawai	219 116 359	248 061 909	289 077 311
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	22 441 872	8 000 644	3 744 318
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 493 230	3 497 938	1 789 604
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14 705 857	21 208 364	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	-	-	18 423 744
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	692 987	1 172 482
2. Belanja Langsung	205 663 054	264 061 969	291 658 364
2.1. Belanja Pegawai	13 920 570	20 772 738	33 093 240
2.2. Belanja Barang dan Jasa	75 305 237	107 482 177	130 770 745
2.3. Belanja Modal	116 437 247	135 807 053	127 794 379

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten

Lampiran 23
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	632 786 840	719 383 518	851 819 625
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13 217 537	37 935 244	-
1. Pendapatan Asli Daerah	56 895 143	78 350 111	108 408 754
1.1. Pajak Daerah	18 208 754	26 708 554	47 318 724
1.2. Retribusi Daerah	35 005 418	46 250 695	11 038 710
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	179 393	861 501	883 184
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3 501 579	4 529 360	49 168 136
2. Dana Perimbangan	436 405 378	491 280 667	585 377 840
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	28 982 863	29 985 271	30 191 366
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	380 493 015	422 094 396	512 824 174
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26 929 500	39 201 000	42 362 300
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	139 486 318	149 752 738	158 033 031
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	16 404 982	22 398 135	41 494 857
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	96 940 601	82 330 965	88 327 070
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 402 441	29 213 940	28 211 104
3.6. Pendapatan Lainnya	20 738 295	15 809 698	-

Lampiran 24
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2010 – 2012 (Ribuan Rupiah)

JENIS BELANJA	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	632 595 081	695 954 538	825 467 973
1. Belanja Tidak Langsung	407 092 868	431 722 062	521 339 938
1.1. Belanja Pegawai	379 233 786	410 975 941	501 791 515
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	21 673 226	10 940 127	10 409 500
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 806 318	9 544 955	6 711 031
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	360 438	-	465 665
1.8. Belanja Tidak Terduga	19 100	261 038	1 962 227
2. Belanja Langsung	225 502 213	264 232 525	304 128 735
2.1. Belanja Pegawai	32 459 715	48 434 891	59 823 652
2.2. Belanja Barang dan Jasa	87 561 903	119 651 194	122 529 748
2.3. Belanja Modal	105 480 595	96 146 439	121 775 335

Sumber : Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kota Palu

DATA

MENCERJASKAN BANGSA

<http://sulteng.bps.go.id>

ISSN 2354-7456



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No.48 Palu Tlp. (0451)483611, 483613 Fax 483612
E-mail: bps7200@bps.go.id, website: <http://sulteng.bps.go.id>